

## AKTIVITAS BISNIS PERSPEKTIF ISLAM DAN KAPITALIS

### (Analisa Komparatif Terhadap Aspek Fundamental Ekonomi Islam dan Kapitalis dalam Aktivitas Bisnis)

**Rosyidin**

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Ta'hdzib Jombang

#### **Abstract**

*Problems of primal which it is important to know, psychologyly that human being character is not will have left nothing to be desired with a[n certain matter. Although in its life have full by properties estae which abundance. Because theoretically said that:, Earnings excelsior, hence excelsior also assess utilitas to reach. Not surprise if later; then a lot place economics as solution fundamental, problem faced of human being, minimum its bearing which often occupy dominant position. Human being claimed to can to conduct the effort exsploration is no desisting in way of solution of problems of economics. And one of source of which cannot be disregarded in problem of economics is Religion. But Islamic economic activity, beside follow economics methods in general, also drape x'self to values of transenden having the character of doctrinal, namely through actualitation conception religion humanism and principal application of consistent islamic in freon configuraton of al-Maqasid asy-Syari'ah.*

*Keywords: economics, al-Maqasid asy-Syari'ah, Islamic economic*

#### **Pendahuluan**

Rotasi dunia membawa manusia kedalam ukiran sejarah kehidupan dari satu dimensi waktu pada dimensi yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas kehidupan manusia selalu mengalami dinamisasi secara pasti yang meliputi berbagai aspek persoalan kehidupan, baik persoalan ekonomi, politik, ataupun budaya. Perubahan waktu selalu konsisten berubah, tetapi ukiran sejarah tidaklah statis mengalami tranformasi progresif dalam menorehkan lukisan tinta emas sebagai gambaran kejayaan. Sebaliknya juga mengalami resesi sejarah kehidupan, baik secara evolutif maupun revolutif-dramatikal. Adanya kontinuitas

problematika kehidupan dan solusi yang ditemukan sebenarnya merupakan indikasi bahwa proses kehidupan sedang berjalan. Kondisi ini berlangsung disemua lini kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.

Berkutat pada masalah ekonomi, pada prinsipnya merupakan pembicaraan yang melibatkan kepentingan semua manusia. Tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang menempatkan ekonomi sebagai pokok pembahasan, manakala persoalan dihadapi manusia, minimal kaitannya yang sering menempati posisi dominan. Manusia dituntut untuk mampu melakukan usaha eksploratif tiada henti dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan ekonomi. Dan salah-satu sumber yang tidak dapat diabaikan dalam persoalan ekonomi adalah Agama. Maka, dalam pembahasan ini akan sangat tampak adanya sebuah dikotomi riil antara aktivitas bisnis yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis dengan berdasarkan kepada *capital power*, persaingan pasar dan kebebasan dalam berekonomi semata. Tetapi Islam dalam kancah aktivitas ekonominya, disamping mengikuti kaidah-kaidah perekonomian pada umumnya, juga menggantungkan dirinya kepada nilai-nilai transenden yang bersifat doktrinal, yakni melalui aktualisasi konsep humanisme religius dan aplikasi prinsip islami yang konsisten dalam konfigurasi frem *al-Maqasid asy-Syari'ah*.

## **Kilas-balik ekonomi Islam dan Kapitalis dalam sebuah overview**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Kata ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al-iqtisbad*, yang secara leksikal (etimologis) dalam literatur Arab berasal dari kata *al-qashdu* (ekonomis) berarti kelurusan cara, dan *al-qashdu* (ekonomis) juga bermakna adil atau keseimbangan. Ekonomis dalam suatu aktivitas merupakan lawan kata dari pemborosan, yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. Sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros juga tidak terlalu kikir.<sup>1</sup>

Secara terminologis, para ahli ekonomi memberikan definisi yang berbeda tentang ilmu ekonomi (*economics*). Dalam *Oxford Dictionary Of Current English* mendefinisikan ilmu ekonomi (*economics*) dengan “*science of the production, distribution and consumption of goods; condition of country as material prosperity*” (Ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi dan konsumsi; kondisi suatu negara dari segi kemakmuran material).<sup>2</sup> Sedang dalam kamus ekonomi didefinisikan bahwa ilmu ekonomi sebagai: “suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia dalam memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan”.<sup>3</sup>

1 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 13.

2 As Hornby, *Oxford Dictionary of Current English* (Great Britain: Oxford University Press, 1986), hlm. 276.

3 Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 371-372.

Maka, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam secara teoritis merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan permasalahan aktivitas manusia dalam sebuah usaha perolehan material untuk terpenuhinya sebuah kebutuhan yang dilakukan secara adil (*justic*) dan seimbang (*equilibrium*) dengan mendasarkan kepada nilai-nilai transenden-doktrinal. Sehingga sebagai implementasinya, bagi para pelaku ekonomi dalam aktivitas bisnis harus konsisten dengan kaidah prinsip tersebut. Dalam pengertian ini, senada dengan pendapat Ghazi Inayah tentang definisi ekonomi, yang sekaligus merupakan respon balik kepada ekonom barat dalam sebuah pendefinisian berkaitan dengan masalah-masalah materi yang tanpa ada perhatian pada masalah rohani, religi, moral dan akhlak.<sup>4</sup>

## 2. Karakteristik dan Konstruksi Ekonomi Islam

Penjelasan di atas, secara konferehensif menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang tampak lebih sempurna dibanding dengan lainnya. Islam berdimensi menyeluruh, yakni dimensi vertikal dan horisontal "*hablun minallah wa hablun minannas*". Dua dimensi tersebut meliputi berbagai sistem tindakan dan tata nilai yang mengatur hubungan antar manusia dan tuhan, dan dimensi horisontal, yakni aturan yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, dan antar manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam pemenuhan kehidupannya.

Sebagai agama yang berpredikat *rahmatan lil alamin*, Islam juga memberikan warna dan corak yang sangat berbeda dan cukup unik. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan adalah visi Islam. Dalam hal ini nampak terlihat pada kontruksi konsep prinsipil ekonomi Islam itu sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa dalam ekonomi Islam terdapat beberapa karakteristik islami sebagaimana berikut;<sup>5</sup>

Bersumber dari Tuhan dan agama (ربنى المصدر والتشريع)<sup>6</sup>

Ekonomi pertengahan dan berimbang (اقتصاد الواسطية والتوازن)<sup>7</sup>

Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan (اقتصاد الكفاية و العدل)<sup>8</sup>

4 Ghazi Inayah, *Dhawabith Tanzim al-Iqtishad fi as-Suq al-Islami* (Kairo: Dar an-Nafais, 1992), hlm. 7.

5 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi..., hlm. 15-20.

6 Sumber awal ekonomi islam berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi islam dihasilkan dari agama allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular kehidupan dalam satu bentuk. Yang berubah hanyalah cabang dan bagian prtikularnya, namun bukan dalam sisi pokok dan sifat universalnya. Lihat, Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 31.

7 Ekonomi islam memadukan kepentingan pribadi dan kemasalahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi islam berposisi tengah antara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi siapapun, dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan individu dan mengubahnya kedalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi negara. *Ibid.*, hlm . 69.

8 Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi (*kehalifah fil-ard*) untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengesplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia.

### Ekonomi pertumbuhan dan barakah<sup>9</sup>

Konstruksi ekonomi islami yang dimaksudkan di atas, berdiri tegak sebagai pilar sekaligus menjadi fondasi dalam melakukan transaksi dibidang muamalat atau mobilitas ekonomi. Pada kaitan ini didasarkan atas lima nilai universal yaitu: <sup>10</sup> *at-Taubid* (faith), <sup>11</sup> *al-'Adalah* (justice), <sup>12</sup> *an-Nubuwwah* (profetik), <sup>13</sup> *al-Khilafah* (government), <sup>14</sup> dan *al-Ma'ad* (hasil/renaissance).<sup>15</sup> Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori Islami.

Lima nilai universal yang menjadi rancang bangun ekonomi Islam tersebut oleh Adiwarmarman Azwar Karim digambarkan sebagai bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap “lihat pada tabel 1.”<sup>16</sup> Landasan ekonomi Islam setidak-tidaknya terdiri dari empat komponen yakni; tauhid, adil, khilafah, dan tazkiyyah.<sup>17</sup> Tampaknya dalam deskripsi krusial ini muncul sebuah perbedaan pendapat dalam memformulasikan prinsip bangunan ekonomi Islam. Namun bila difahami secara spesifik dan konprehensif pada substansinya, tidak mengalami sebuah dikotomisasi pemahaman yang cukup signifikan mengenai prinsip dasar tersebut. Dan berdasarkan nilai universal itu juga, muncul prinsip-prinsip derivatif yang sekaligus merupakan karakteristik dari beberapa ciri ekonomi Islam itu sendiri, yakni; *Multiple Ownership* (kepemilikan multi jenis), *Freedom to*

9 Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara-cara legal, agar harta tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari mediasi jaminan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Islam melarang secara keras praktek monopoli, penumpukan dan penghentian pengalokasian dan perputaran. Islam juga melarang pengalokasian harta terhadap orang yang mengutamakan harta dengan kebodohan dalam mengelolanya. Ibid.

10 Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

11 Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan menyaksikan bahwa tiada suatu pun yang layak disembah kecuali Allah. tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (suber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

12 Adil menurut pengertian ini adalah “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Berarti dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

13 Kenabian adalah gambaran “model manusia sempurna” yang harus diteladani secara totalitas melalui aktualitas berbagai sifat-sifat Kenabian yaitu; Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung-jawab, kepercayaan, kredibel), Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita), Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) dalam aktivitas ekonomi, untuk dapat mewujudkan perekonomian yang sempurna.

14 Prinsip ini (khilafah), didasarkan kepada hadis Nabi: “setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik ia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kericuhan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

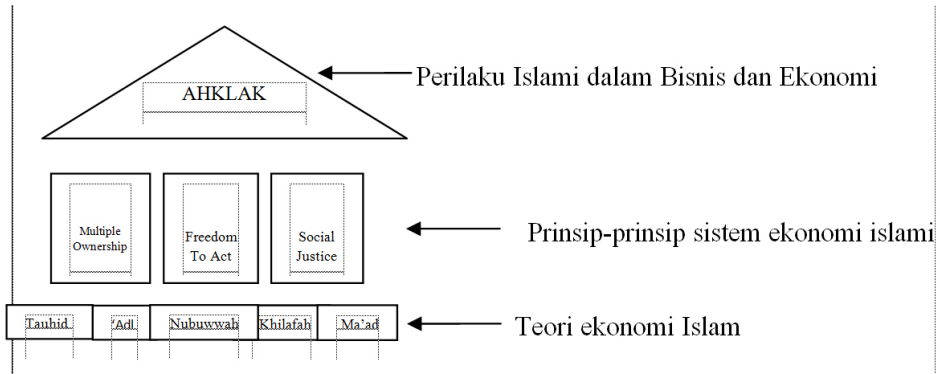
15 Kata Ma'ad sering kali diartikan sebagai kebangkitan (renesaince), tetapi secara harfiah berarti “kembali”. Karena pada dasarnya semua yang ada akan kembali kepada Allah. Maka, setiap apa yang berbuat harus ada pertanggungjawabannya, karena kelak akan ditanyakan sesuai dengan amalnya.

16 Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 34.

17 Masyhuri (ed), *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 14.

*Act* (kebebasan bertindak atau berusaha), dan *Sosial Justice* (keadilan sosial).<sup>18</sup>

**Tabel 1. Bangunan Prinsip Ekonomi Islam<sup>19</sup>**



### Pengertian Ekonomi Kapitalis

Istilah Kapitalisme tidaklah asing lagi bagi wacana intelektual muda Islam. Jika ditelusuri arti katanya, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu; *capital* berarti; modal atau modal untuk penanaman (*capital for investment*).<sup>20</sup> Modal dalam hal ini mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan proses perekonomian. Sedangkan kapitalis adalah pemilik modal atau penyandang modal.<sup>21</sup> Berarti disimpulkan bahwa kapitalisme adalah; suatu sistem perekonomian yang mendasarkan pada kekuatan modal dalam mengembangkan usaha untuk memperoleh keuntungan. Menurut pendapat lain dikatakan:

هي النظام الإقتصادي لكثير من البلدان في مختلف أرجاء العالم. وسميت الرأسمالية لأن الفرد بوسعه أن يملك ما يريد، وتشجع الرأسمالية حرية العمل التجاري والإقتصاد الحر. لأنها تسمح للناس بأن يباشروا أنشطتهم الإقتصادية بصورة مباشرة و متحررة إلى حد كبير من التدخل والتحكم الحكوميين.<sup>22</sup>

Secara jelas menurut statemen tersebut bahwa kapitalisme adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang banyak digemari atau “dipraktekkan” oleh negara-negara dalam “membendung” suatu sumber daya alam dan “kekayaan” dengan cara yang relatif berbeda. Dikatakan kapitalisme, karena kepemilikan harta individu bisa dikembangkan dan dioperasikan secara leluasa untuk mendapatkan harta atau keuntungan yang surplus dengan sekehendaknya. Membuka luas perdagangan dalam persaingan pasar bebas. Dan oleh karenanya, yang digembor-gemborkan oleh kapitalisme yang sesungguhnya adalah semangat ekonomi secara langsung dan terbuka dalam bentuk kebebasan berinvestasi dan mengatur sistem perekonomian.

<sup>18</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 42-44.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>20</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia “An English-Indonesian Dictionary”* (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 97.

<sup>21</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 305.

<sup>22</sup> ‘Ali bin Muhammad al-Jum’ah, *Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah* (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000), hlm. 71.

### **Karakteristik dan Konstruksi ekonomi kapitalis**

Kapitalisme sebagai suatu sistem perekonomian, secara spesifik memberikan konsekuensi riil terhadap corak perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan melalui agenda besar kapitalisme, yang secara nyata ingin merubah perekonomian dunia secara simultan untuk menuju kemakmuran negara. Adam Smith sebagai bapak kapitalisme, dalam *magnum opus*-nya "*The Wealth of Nations*" mencoba menyakinkan pembacanya bahwa model untuk kesuksesan ekonomi yang dikemukakannya akan menghasilkan "kekayaan universal yang akan sampai ke golongan rakyat yang paling bawah sekalipun"<sup>23</sup>. Walaupun demikian, sebenarnya dalam sistem kapitalisme itu sendiri secara eksklusif terdapat banyak kelemahan yang telah memporak-porandakan perokonomian, yakni resesi ekonomi besar-besaran. Maka, untuk lebih mendalam mengenal konstelasi kapitalisme, dapat dilakukan sebuah elaborasi-identifikatif melalui prinsip-prinsip, karakteristik dan langkah tujuannya. Di antara dari karakteristiknya sebagai berikut:<sup>24</sup>

Kapitalisme bukanlah sistem yang membenarkan adanya kepemilikan individu dan persaingan di dalamnya, atau kebebasan individu untuk memiliki dan memperluas kepemilikan berdasarkan nilai-nilai individu. Di samping itu juga beranggapan ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan "keinginan" (*want*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.

Ia berasumsi bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengolahan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu. Dan beranggapan bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif, sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.

Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Harta kekayaan tidak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk diinvestasikan dalam dunia bisnis.

Sebuah sistem yang tidak menjadikan harta sebagai alat untuk menjaga kehidupan karyawan, tetapi hanya untuk meningkatkan dan mengembangkan harta semata, apalagi bertujuan untuk menjaga kebutuhan orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan.

Untuk melancarkan sebuah sistem perekonomian agar dapat bergerak dan berkembang progresif secara konsisten, Adam Smith sebagai pioner

<sup>23</sup> Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi; Sang Maestro, Teori-Teori Ekonomi Modern (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 19.

<sup>24</sup> Abdul Sami' al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 193., dan lihat, M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 18.



kapitalisme merumuskan beberapa prinsip umum model Ekonomi Klasik Smith, sebagaimana berikut:<sup>25</sup>

1. Penghematan, kerja kearas, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebajikan dan karena itu harus didukung.
2. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari serangan asing.
3. pada bidang ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan *laissez-faire* nonintervensi (perdagangan bebas, pajak rendah, birokrasi minimal, dan sebagainya).
4. Standar klasik emas/ perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil dimana ekonomi bisa berkembang.

Adapun langkah-langkah yang ditentukan oleh kaum kapitalis untuk mencapai tujuannya, adalah sebagaimana berikut:<sup>26</sup>

1. Menumpuk kekayaan dengan melakukan monopoli pasar.
2. Menentukan pajak yang memberatkan.
3. Menguras kekayaan dengan menentukan keuntungan yang melimpah.
4. Mendorong masyarakat untuk suka kepada kemewahan dan kehidupan glamor.
5. Meningkatkan upah kerja dan menaikkan harga.
6. Membudayakan minuman keras dan menghilangkan etika dan akhlak dari kehidupan.
7. Mengembangkan kaidah-kaidah ekonomi yang merusak.
8. Menyulut api permusuhan di antara negara-negara dunia.
9. Menjadikan emas sebagai setandar ekonomi.

Dari berbagai uraian di atas, tampak jelas bagaimana sebenarnya sistem perokomian yang diterapkan oleh kapitalis. Apakah ia memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi individu ataupun negara-negara yang berkecimpung di dalamnya, dengan menjanjikan kemakmuran?, atau bahkan memberikan impact negatif kepada elemen pelaku sistem kapitalis itu sendiri?, ataukah pada subtansinya kapitalisme tidak pernah sama sekali akan memberikan janjinya itu?. Maka, untuk dapat menjawab persoalan bagaimana sebenarnya sistem yang tepat dan akurat, sebagai suatu sistem alternatif dalam perekonomian, dan menjanjikan suatu kemakmuran bagi negara, maka persoalan ini akan dijawabantahkan dalam pembahasan selanjutnya.

25 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi; Sang Maestro, Teori-Teori Ekonomi Modern (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 42.

26 Abdul Sami' al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam..., hlm. 190-191.

## **Analisa Komparatif Terhadap Aspek Fundamental Ekonomi Islam dan Kapitalis dalam Aktivitas Bisnis Menuju Humanitarian Sistem Ideal**

Ada beberapa pokok permasalahan penting dalam aktivitas bisnis atau perekonomian yang menjadi ujung tombak perhatian, yaitu meliputi tiga aspek; produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena pada dasarnya objek material yang menjadi sasaran perekonomian, menurut ilmu ekonomi adalah; "*usaba manusia bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikannya kepada masyarakat*".<sup>27</sup> Maka dalam pembahasan ini, terfokuskan kepada tiga aspek kajian tersebut, yang akan diuraikan secara anatomis dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Dua entitas yang berbeda telah menjadi syarat bagi kajian komparatif. Walaupun pada hakikatnya tidak diujipun secara niscaya jelas-jelas berbeda. Hal demikian diasumsikan kurang spektakuler terhadap kedalaman analisis objek kajian dengan berbagai perangkat objek formal yang digunakan "menurut salah satu pendapat ilmuwan". Implikasinya, hasil dari pengkajian sebuah keilmuan terkesan dangkal dan hanya sampai pada tataran deskripsi semata. Terlepas dari asumsi demikian, di samping tiga aspek pokok tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan krusial yang antagonistik antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, dalam hal ini tampak sekali berkaitan dengan permasalahan kepemilikan atau hak milik.

### **Kepemilikan atau Hak Milik**

Berbicara tentang hak milik dalam dunia ekonomi, secara otomatis dipaksakan untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap tiga arus besar aliran ekonomi, yaitu ekonomi kapitalisme, sosialisme dan ekonomi Islam. Dalam kaitan ini, secara kongret muncul berbagai perdebatan secara fundamental mengenai sistem ekonomi yang digunakan oleh masing-masing tiga arus besar aliran ekonomi yang bersangkutan tersebut.

Pertama: dalam kebijakan ekonomi kapitalisme, berdiri berlandaskan hak milik khusus atau hak milik individu. Ia memberikan kepada setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang yang produktif maupun yang konsumtif, tanpa ikatan apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan, maupun mengeksploitasi kekayaannya.

Sikap ekonomi kapitalisme, memandang hak milik secara utuh sesuai dengan falsafahnya; yaitu *falsafah individualisme*, yang berpandangan bahwa individu merupakan proses segala yang ada, dan kebahagiaan individu, kemerdekaan, dan kebebasannya merupakan cita-cita sistem politik dan ekonomi.<sup>28</sup> Oleh karena itu

27 M. Umar Burhan, Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro (Malang: BPFE-UNIBRAW,2006), hlm. 3.

28 Ahmd Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 40.



ia memandang suci terhadap hak milik individu. Meskipun sistem kapitalisme berlandaskan hak milik khusus sebagai suatu kaidah, ia tidak keberatan untuk mengakui beberapa bentuk hak milik umum bila harus mendahulukan hal-hal yang memberi manfaat kepada umum.

Kedua: secara indordo, ekonomi sosialisme berlandaskan pada hak milik umum atau hak milik orang banyak yang diperankan oleh negara atas alat-alat produksi.<sup>29</sup> Ia tidak mengakui hak milik individu kecuali hal-hal yang berlainan dengan dasar pokok yang umum itu. Dalam lingkungan sistem ini, seorang tidak diizinkan memiliki harta dari hasil produksi. Negaralah pemilik satu-satunya alat-alat produksi, semua rencana dan pengabdian-pengabdian yang berguna bagi seluruh bangsa.

Sedangkan ekonomi Islam “Ketiga”, adalah ekonomi alternatif yang mengakui berbagai kepemilikan atau hak milik (*multi ownership*), baik hak milik pribadi, hak milik umum dan hak milik negara.<sup>30</sup> Namun pada dasarnya menurut Islam, yang mempunyai hak milik secara mutlak adalah *rabb al-jalil*. Sedangkan manusia adalah sebagai *Khalifah al-‘Ard*, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur’an (Qs; al-Baqarah: 30).<sup>31</sup>

Hematnya, dalam Islam secara global, bahwa kepemilikan<sup>32</sup> atau hak milik terbagi kedalam empat bagian<sup>33</sup>, yaitu 1). *al-Milkiyah al-Fardiyah* (Kepemilikan Individu),<sup>34</sup> 2). *al-Milkiyah al-Ammah* (Kepemilikan Publik),<sup>35</sup> 3). *al-Milkiyah al-Muzdawijah* (Kepemilikan Ganda), 4). *al-Milkiyah ad-Daulah* (Kepemilikan Negara). Sedangkan secara rinci, kepemilikan dalam Islam dapat dilihat dalam tiga perspektif atau sudut pandang; a). Dari sudut pandang atau segi obyeknya (*mahal*), terbagi menjadi empat bagian: 1). *Milk al-‘Ain*, 2). *Milk al-Manfaat*, 3). *Milk al-‘Ain wa al-Manfaat*, 4). *Milk al-Dain*.<sup>36</sup> b). Dari segi kepemilikan seorang (*shahib*) terbagi menjadi dua bagian: 1). *Milkiyyah khassah*, 2). *Milkiyyah ‘Ammah*.<sup>37</sup> c). Dari segi bentuk kepemilikan juga terbagi kedalam dua bagian: 1). *Milkiyyah Mutamayyizah*, 2). *Milkiyyah Sya’iah*.<sup>38</sup>

29 Ibid.

30 Masyhuri (ed), ..., hlm. 15.

31 *وإذ قال ربك للملكة إني جاعل في الأرض خليفة*.

32 الملك في اللغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراده. وفي اصطلاح الفقهاء: علمنا فيما سبق أن ما حيز من الأشياء كان مملوكا وما لم يحز كان مباحا غير مملوك. ولأن أساس الملك الاختصاص والمنع والتعامل وهذه الحيازة وهذا الاحتصاص : lihat, Abdul Hamid Mahmud al-Ba’la, *Al-Milkiyyah wa Dhawabithiha fi al-Islam*, Dirasat Muqaranah ma’ Ahdatsi at-Thabaqat al-Ilmiyah al-Mu’ashirah (Al-Azhar/Mesir: dar at-taufiq an-namudzujiyyah, 1985) hlm. 25.

33 ‘Ali bin Muhammad al-Jum’ah, *Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah* (Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000), hlm. 73.

34 Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Pearansuransian Syari’ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 38-39.

35 Hak milik umum adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau jama’ah kaum muslimin. Ibid.

36 Abdul Hamid Mahmud al-Ba’la, *Al-Milkiyyah wa Dhawabithiha...*, hlm. 61.

37 Ibid.

38 Ibid., dan lihat, Ghufuron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 64-67.

Maka, dari berbagai perspektif mengenai kepemilikan tersebut, memberikan indikasi dan sinyalmen kuat terhadap Islam, bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem jitu dan universal yang memfeto parsialitas (*partiality*) terhadap hak milik, baik yang bersifat individualistis maupun sosialis. Tetapi sistem ekonomi Islam lebih bersifat partisipatoris (*participle*) terhadap hak milik. Sehingga di samping sistem ekonomi Islam dikatakan sebagai sistem ekonomi alternatif, juga beratribut sebagai sistem ekonomi *way of life*. Walaupun secara individual ada sebagian yang berpendapat kurang sepakat jikalau ekonomi Islam dikatakan sebagai sistem ekonomi alternatif yang diasumsikan sebagai sistem ekonomi cadangan dari kegagalan sistem ekonomi sebelumnya. Oleh karena itu, double jelasnya, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi universal dan independen, berpihak kepada siapapun dengan akurasi sistemiknya yang dapat teraplikasikan secara tapal batas di sepanjang zaman.

### Aktivitas Produksi

Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh individu, keluarga ataupun perusahaan. Ketika telah dihimpun faktor produksi dan kemudian diolah, maka jadilah barang jadi atau produk. Jika produk tersebut dapat dihasilkan oleh perorangan atau keluarga, lalu mengapa ada perusahaan. Seandainya tidak ada lembaga yang namanya perusahaan, maka setiap kali akan dilakukan produksi perlu adanya transaksi antara produsen (pemilik dan penanggung-jawab produksi) dengan pemasok faktor-faktor produksi, terutama dengan tenaga kerja. Hal ini selain tidak praktis, jumlah biaya transaksi juga mahal. Dalam perusahaan, transaksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kontrak untuk priode tertentu sehingga biaya transaksi relatif murah.

Pengertian umum produksi secara leteral adalah suatu proses pengolahan bahan baku faktor produksi menjadi barang jadi atau produk, yang menurut teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (*input*) untuk produksi dan menjual keluaran (*output*) atau produk.<sup>39</sup> *Output* yang dihasilkan dari produksi didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung atau melalui agen-agen distributor, dengan orientasi untuk mencari tingkat keuntungan lebih (*surplus revenue-rate*) dari biaya total operasional produksi. Maka, untuk memaksimalkan keuntungan maupun efisiensi produksi tidak terlepas dari dua hal: yakni struktur biaya produksi dan *revenue*.<sup>40</sup> Dan perlu diingat bahwa; sebuah aktivitas produksi tidak akan dapat berjalan sesuai dengan animo perusahaan, kecuali telah memenuhi faktor-faktor produksi yang menurut ilmu ekonomi digolongkan menjadi tiga

---

39 Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 101.

40 Ibid.

faktor; *capital*,<sup>41</sup> *materials*,<sup>42</sup> dan *labor*.<sup>43</sup>

Dalam ekonomi kapitalisme, mungkin Adam Smith yang pertama kali menteorikan bahwa pemberian ruang yang sebesar-besarnya bagi individu untuk berperan dalam dunia produksi (mikro-ekonomi) yang nantinya akan berjalan paralel dengan tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara.<sup>44</sup> Adam Smith juga mendukung intervensi minimal dalam makro-ekonomi oleh negara. Negara-negara yang paling mendekati visi kapitalisme *laissez faire* Smith telah mencapai standar hidup tertinggi. Berikutnya adalah John Maynard Keynes; dia mendukung kebebasan individual, tetapi ia juga sering mendukung intervensi makro-ekonomi dan nasionalisasi investasi.<sup>45</sup>

Maka, dengan minimalisasi intervensi negara dalam produksi model Smith, menjadikan negara mandul tanpa peran dalam perilaku mikro-ekonomi. Negara hanya menjadi fasilitator dan penjaga keamanan investasi. Proses produksi kemudian diserahkan sepenuhnya dalam mekanisme pasar berdasarkan hukum logika *supply and demand*. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai liberalisme yang dianut hampir di semua belahan bumi.<sup>46</sup>

Dalam ekonomi Islam, aktivitas produksi bukanlah semata untuk mencari keuntungan (*profit-oriented*) individu untuk memperkaya dan mencari kepuasan (*wants*) pribadi. Tetapi merupakan kewajiban sosial (*fard al-keifayah*) yang didasarkan kepada nilai-nilai *ubudiyah*, sebagaimana pendapat Al-Ghazali.<sup>47</sup> Dalam pengertian ini berarti, apabila terdapat suatu kelompok menjalankan aktivitas produksi untuk kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhannya. maka, dengan suatu kelompok yang menjalankan produksi tersebut, menggugurkan kewajiban produksi umat masyarakat pada umumnya, terhadap pemenuhan dan keamanan jiwanya.

Pada tahap berikutnya, secara konsisten mengenai pemahaman tersebut “kesejahteraan” oleh al-Ghazali dibingkai dalam *al-Maqasid asy-Syariah*-nya secara global, yakni; (a). *al-hifd al-din*, (b). *al-hifd al-nafs*, (c). *al-hifd an-nasl*, (d). *al-hifd al-mal*, (e). *al-hifd al-‘aql*, yang selanjutnya oleh al-Ghazali diekstraksi kedalam tiga nilai utilitas secara fungsional dari aspek ekonominya, yaitu: (a). *dharuriyat* (b). *hajiyyat*, dan (c). *tahsiniiyyat*.<sup>48</sup> Pendapat demikian juga dapat ditemukan dalam teori *maslahah* asy-Syatibi, sebagai salah-satu icon tokoh Islam yang secara kalibernya telah mendunia dengan idea pemikiran *genuine*-nya.

41 Capital: termasuk didalamnya; tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/ persediaan.

42 Materials: bahan baku dan pendukung, yakni semua yang beli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air, dan bahan baku produksi.

43 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 108.

44 Mohammad Hatta, Sosialisme Religius; Suatu Jalan Keempat (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 36.

45 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi..., hlm. 9.

46 Mohammad Hatta, hlm. 36.

47 Adiwarmanto Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 328.

48 Ibid., hlm. 318.

Tidak kalah pentingnya Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi pemikiran ekonominya dalam kaitan produksi. Menurutny: produksi adalah aktifitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Dalam produksi yang paling utama adalah tenaga kerja manusia. Laba (produksi) adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia mencapai produksi dengan tanpa upayanya sendiri<sup>49</sup> (*invisible hand*), melainkan harus dikombinasikan dengan yang lain. Tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Tandasnya, bahwa manusia adalah binatang ekonomi, yang tujuannya adalah produksi.<sup>50</sup>

Pada prinsipnya, produksi dalam pengertian umum adalah suatu aktivitas yang menciptakan manfaat (*utility*) baik dimasa kini atau mendatang.<sup>51</sup> Dalam hal ini dilakukan melalui pemrosesan meliputi tiga aspek prosedural, yakni; dari *input*, proses produksi, dan *output* yang dihasilkan (produk). Tetapi dalam produksi Islam tidaklah terbatas pada tiga aspek produksi tersebut, melainkan melalui proses filterisasi (*screening*) *cor bussines* dan *financial ratio*, dan aspek-aspek lainnya yang kontra-produktif dengan produk syari'ah, bahkan secara ekstrim dikatakan; bahwa suatu aktivitas produksi yang tanpa memerhatikan keabsahan (kehalalan) obyek dan sektor bisnisnya, bukan dinamakan sebuah produksi. Karena secara substansial produksi islami merupakan suatu aktivitas yang mempunyai utilitas obyektif dan mengandung nilai transenden, serta bertujuan demi kemaslahatan sosial.

### Distribusi Pendapatan

Dari beragam segmen ekonomi, tidak jauh pentingnya sebuah distribusi. Karena, setiap *otuput* dari sebuah produksi tidaklah mempunyai urgensitas substansial dan *absurd* jikalau tidak didistribusikan kepada konsumen bagi *big-corporate* yang tujuan awalnya adalah keuntungan (*profit oriented*). Dalam distribusi, pertama kali yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memenuhi hak komponen-komponen produksi. Karena komponen tersebut secara mikro-ekonomi merupakan bagian dari ruh perusahaan. Sehingga dalam perilaku perusahaan dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak terjadi *leg internal* yang akan merugikan dan menggerogoti etos kerja, serta eksistensi perusahaan itu sendiri.

Dalam pandangan kapitalisme, distribusi terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, kemudian hasil tersebut didistribusikan pada komponen-

49 Misalnya: lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang, dan hal-hal lainnya. Namun demikian, hal ini hanya merupakan pendukung saja.

50 Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun, Muqadimah (ttp, Dar al-Fikr, tt), dikutip dalam; Adiwarmar Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam..., hlm. 394-395.

51 Muhammad Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 102.

komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:<sup>52</sup>

1. *Upah*, yaitu upah (*wages*) bagi para pekerja, dan seringkali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah dibawah standar.
2. *Bunga*, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan kepada pemilik proyek.
3. *Ongkos*, yaitu ongkos (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek, dan
4. Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung-jawab sepenuhnya.

Akibat dari perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, maka berbeda-beda pula pendapatan yang diperoleh masing-masing individu. Perbedaan pendapatan merupakan konsekuensi logis dari kinerja personal (*personal skill*), dan level posisional secara struktural perusahaan. Hal demikian tidak dapat dipungkiri, karena diakui bahwa tingkat kemampuan perorangan relatif terbatas, sehingga dengan keterbatasannya membentuk suatu nilai kerja bervariasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Permasalahan distribusi pendapatan seperti ini, dalam pandangan kapitalisme klasik adalah distribusi yang adil. Karena menurutnya “adil” didefinisikan sebagai “anda dapat apa yang anda upayakan (*you get what you deserved*)”.<sup>53</sup>

Secara kongret, bahwa konsep keadilan kapitalisme klasik dibangun atas landasan individualisme murni, sehingga ia berhak menentukan (memonopoli) distribusi pendapatan sesuai dengan kehendaknya “sebagai pemegang modal”. Maka, impact yang akan ditimbulkan dari sikap tersebut adalah tirani manifesto secara dramatis yang merugikan masyarakat. Dalam praktek pendistribusian produk misalnya; mereka hanya akan memberikan perhatian kepada pengusaha dekatnya, dengan didistribusi lebih dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lain, yang menurutnya banyak memberikan keuntungan. Dan yang paling penting, dalam hal produksi, mereka juga memberikan prioritas terhadap produksi barang-barang mewah untuk memenuhi kebutuhan dan merealisasikan kepuasan orang-orang kaya.<sup>54</sup> Sehingga dalam distribusi produknya pun tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat bawah atau kaum proletar.

Sedangkan menurut ekonomi sosialis, prinsip dalam distribusi pendapatan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional,

52 Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 347.

53 Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, “edisi ketiga” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36.

54 Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, hlm. 348.

dan negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya, baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa.<sup>55</sup> Dan mengenai “keadilan” menurutnya “Sosialisme Klasik”: didefinisikan sebagai “sama rata sama rasa (*no one has a privilege to get more than others*)”.<sup>56</sup>

Bangunan konsep keadilan sosialisme tampak sekilas terpoles rapi dalam frem tafsir keadilan itu sendiri. Akan tetapi, sosialisme tidak ubahnya sama dengan kapitalisme yang menggrogoti rakyat dengan memainkan peranan pasar (monopoli pasar), justru sosialisme dalam peran ekonominya lebih parah dan sangat keruh, yaitu: memonopoli negara yang mempunyai sarana produksi. Negara menguasai keuntungan dan tidak dikembalikan –seperti pengakuan mereka- kepada para buruh (pekerja) yang menampilkan surga yang dijanjikan untuk mereka dalam bayang-bayang sistem sosialisme.<sup>57</sup>

Bertolak dari kedua sistem di atas, secara indordo ekonomi Islam mengambil jalan tengah, yaitu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan suatu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.<sup>58</sup> Dalam al-Qur’an dijelaskan:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذی القری والیتمی والمساکین وابن السبیل  
کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منکم..... (الحشر: 7).

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai’i*) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, suapaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.<sup>59</sup>

Ayat ini menjelaskan prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam; kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Jika pemerataan ini dapat terealisasi secara ideal, maka dalam kehidupan bermasyarakat tidak terjadi *lag sosial* yang sangat tajam, dengan memetak-metak dalam model stratifikasi sosial. Sehingga kecemburuan sosial dapat teratasi dengan baik, dan terjauhkan dari *moral hazard* kemanusiaan.

Distribusi ekonomi islam pada prinsipnya didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu: nilai kebebasan dan

55 Ibid.

56 Adiwarmar Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga”..., hlm. 36.

57 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam..., hlm. 349.

58 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hlm. 93.

59 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Khadim al-Haramain Asy-syarifain Al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf Asy-Syarif, (Madinah Munawarah:), hlm. 916.



nilai keadilan.<sup>60</sup> Arti kebebasan bukanlah dipahami sebagai sebuah kebebasan aktivitas yang tapal batas, dengan mendasarkan pada paham utilitarian.<sup>61</sup> Tetapi kebebasan itu harus disandarkan kepada nilai-nilai religiusitas dan berjalan di atas rel lalu-lintas syari'at, yakni menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan keadilan menurut Islam didefinisikan sebagai “tidak menzalimi tidak pula dizalimi (*la tazhlimuna wala tazhlamun*)”.<sup>62</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah; 279.<sup>63</sup>

Hematnya, sistem ekonomi Islam telah memberikan sumbangsih bagi kemanusiaan, yaitu membuka kekayaan para kapitalis dan membagi-bagikan timbunan kekayaan mereka kedalam pembagian yang teratur. Dua kewajiban yang mengatur secara efektif, yaitu sadaqah wajib dan sadaqah nafilah, telah membantu memperoleh keobjektifan pembagian tanpa mengganggu kebebasan individu dan hak pemilikan. Setiap orang menjalankan kewajibannya baik yang wajib ataupun yang sunnah, dengan rela, ikhlas, dan bersungguh-sungguh semata-mata mencari keridlaan Allah.<sup>64</sup> Disamping pengetrapan dua nilai prinsipil “kebebasan dan keadilan” dalam ber-*fastabiq al-khairat* di bidang ekonomi, Islam juga memberikan solusi alternatif terhadap pemerataan distribusi, yaitu melalui zakat, pajak, pendidikan dan pewarisan harta-benda.

### Konsumsi

Konsumsi adalah permintaan (*demand*), sedangkan produksi adalah penyediaan (*supply*). Pada kenyataannya, setiap manusia harus melakukan konsumsi untuk dapat bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Manusia dalam kegiatan konsumsi dihadapkan pada beragam preferensi barang yang secara tegas harus ia tentukan. Penentuan terhadap preferensi salah-satu barang tersebut, karena menurutnya diyakini dapat memberikan nilai kepuasan lebih bagi kegiatan konsumsinya, atau dalam istilah ekonomi biasa disebut dengan utilitas (*utility*).

Secara etimologi, *utility* berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dikatakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan

60 Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, hlm. 349.

61 Utilitarian/ Utilitarianisme; teori etika yang mengatakan, bahwa manfaat, dalam arti kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya, harus menjadi tujuan segala tindakan dan ukuran untuk menilai tindakan-tindakan tersebut.

62 Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, “edisi ketiga”..., hlm. 36.

63 *فإن لم تفعلوا فآذتوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون*

64 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid. 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hlm. 94-95.

oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang.<sup>65</sup>

Menurut Gossen yang tercatat sebagai orang yang telah lebih memperhatikan perihal nilai guna barang. Ia menyimpulkan bahwa: bilamana seseorang mengonsumsi barang secara terus-menerus, ada kecenderungan bahwa tambahan nilai guna barang tersebut semakin lama semakin berkurang. Bayangkanlah seorang yang sedang lapar mengonsumsi nasi soto. Satu piring nasi soto mungkin belum cukup untuk menghilangkan rasa laparnya, bahkan dua piringpun belum cukup. Namun kepuasan yang diberikan piring kedua lebih rendah dari yang diberikan oleh piring yang pertama, dan kepuasan yang diberikan oleh piring yang ketiga lebih rendah dari yang diberikan oleh piring yang kedua (lihat tabel. 2). Tambahan nilai guna dari tambahan konsumsi satu unit barang disebut *marginal utility*.<sup>66</sup>

**Tabel. 2: Total utility dan Marginal Utility Nasi Soto.**

Piring Ke	<i>Total Utility</i>	<i>Marginal Utility</i>
1	100	-
2	180	80
3	230	50
4	240	10

Dalam prakteknya, mengukur nilai guna dari barang yang dikonsumsi dengan ukuran kardinal<sup>67</sup> terasa kurang realistis, karena konsumen tidak tahu secara persis berapa sebenarnya tingkat kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang. Kepuasan itu bisa dirasakan, tetapi sulit untuk dapat dinyatakan dalam angka-angka.<sup>68</sup>

Terlepas itu, menurut pandangan ekonomi kapitalisme, sebuah aktivitas konsumsi berlaku secara bebas tanpa ada batasan, selagi ia mampu untuk mendapatkan (membeli) utilitas barang tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam pemenuhan kepuasan keinginan (*wants*) nafsunya. Mereka tidak memperdulikan atas barang yang dikonsumsinya halal atau haram. Karena pada dasarnya paradigma hidup yang mereka gunakan adalah pola hidup hedonistik dan glamor. Hal ini telah tercemin dalam karakteristik kapitalisme itu sendiri sebagaimana penjelasan di atas. Begitu juga halnya sosialisme yang tidak jauh bedanya dengan pola hidup yang dipraktikkan oleh kapitalisme.

Menurut ekonomi Islam, aktivitas konsumsi terhadap berbagai jenis barang tidaklah dilarang, selama masih dalam koridor syari'at. Dalam ekonomi Islam konsumsi tidaklah semata mencari kepuasan nafsu semata, yang bertujuan untuk mencari kebahagiaan dunia. Tetapi juga didasarkan atas nilai-nilai *ubudiyah*

65 Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 127.

66 M. Umar Burhan, *Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro...*, hlm. 38.

67 Kardinal dalam pengertian ini, diperlakukan sebagai pendekatan yang menganggap bahwa besarnya nilai guna (utility) dari setiap barang tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk angka kardinal yang dapat dijumlah, dikurangi, dan dibagi.

68 *Ibid.*, hlm. 41.

yang tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam adalah konsumsi yang mempunyai nilai *maslahah* yang terdiri dari manfaat dan berkah.<sup>69</sup> Atas dasar pengertian ini, aktivitas konsumsi Islam disandarkan kepada lima prinsip berikut:<sup>70</sup>

1. Prinsip keadilan.
2. Prinsip kebersihan.
3. Prinsip kesederhanaan.
4. Prinsip kemurahan hati.
5. Prinsip moralitas.

Lima prinsip tersebut telah dipertegas oleh al-Qur'an dalam surat 'Ali Imrom: 180, al-Isra': 26-27, al-A'raf: 31, al-Furqan: 67, dan surat al-Isra': 29. Ditambah lagi dengan sabda rasul dalam kaitan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam membelanjakan harta dikatakan: "*kesederhanaan (keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran) merupakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi*". Sementara al-Rozi telah menjelaskan ayat al-Qur'an tersebut dengan mengatakan bahwa Allah tidak menganggapnya kesederhanaan (tidak boros) dan tidak pula bakhil dalam membelanjakan harta benda, merupakan sifat-sifat dari hamba-Nya yang baik.<sup>71</sup>

Permasalahan terpenting yang perlu diketahui, secara psikologi bahwa watak manusia tidaklah akan pernah terpuaskan dengan suatu hal tertentu. Walaupun dalam kehidupannya telah tergelimangi oleh harta kekayaan yang melimpah. Karena secara teoritis dikatakan bahwa, Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula nilai utilitas yang akan dicapainya (lihat tabel. 3). Dan singkatnya menurut pendapat yang ekstrim, bentuk pembelanjaan yang dianggap halal adalah apabila seorang itu mampu hidup dengan memuaskan kebutuhannya pada taraf yang sederhana. Jika terdapat kelebihan, Islam menganjurkan supaya itu digunakan untuk beramal kebajikan, keadilan, kebajikan umum dan memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu berusaha untuk mendapatkan bagian yang sewajarnya.<sup>72</sup> Mengenai tingkat urutan prioritas kebutuhan dalam konsumsi, telah teruraikan dalam penjelasan di atas

---

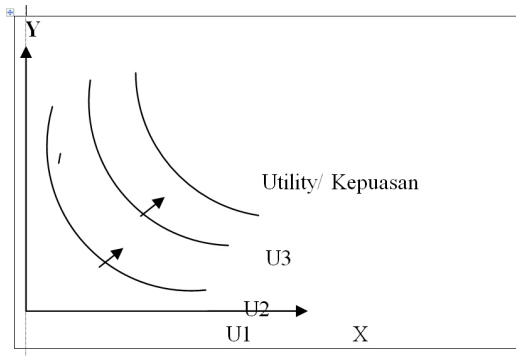
.Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam...*, hlm. 129

70 Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 45.

71 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid. 1..., hlm. 81.

72Ibid., hlm. 82.

Tabel 3. Nilai Utilitas Konsumsi



### Kesimpulan

Terlepas dari fanatisme religiusitas, secara netral mengakui bahwa sistem ekonomi yang mempunyai nilai akurasi aplikatif secara tapal batas di sepanjang zaman adalah sistem ekonomi Islam, baik dari sektor produksi, distribusi maupun konsumsi. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang humanis, menjunjung tinggi martabat manusia sesuai dengan atribut kemulyaanya, yaitu sebagai makhluk yang sempurna (*absanu-taqwim*), yang secara posisional sebagai *Khalifatullah fi al-Ard*. Dengan penyandaran ekonomi kepada nilai-nilai ketuhanan yang transendental, sistem ekonomi Islam menjadi sistem yang bermartabat, berkeadilan, berimbang dan banyak mengandung nilai-nilai berkah, yang secara global telah tercermin dalam bingkai *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Tentunya dalam penulisan makalah ini banyak kekurangan, dengan senang hati membuka secara lebar atas kritik dan saran yang konstruktif.

### Daftar Pustaka

- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- As Hornby, *Oxford Dictionary of Current English*, Great Britain: Oxford University Press, 1986.
- Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
- Inayah, Ghazi, *Dhawabith Tanzīm al-Iqtishad fi as-Suq al-Islami*, Kairo: Dar an-Nafais, 1992.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, “edisi ketiga”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masyhuri (ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

- M. Echols, John dan Shadily, Hassan, Kamus Inggris Indonesia “*An English-Indonesian Dictionary*”, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- A. Partanto, Pius dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- al-Jum’ah, ‘Ali bin Muhammad, *Mu’jam al-Musthalabat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000.
- Skousen, Mark, *Sejarah Pemikiran Ekonomi; Sang Maestro, Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- al-Mishri, Abdul Sami’, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Burhan, M. Umar, *Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro*, Malang: BPFE-UNIBRAW, 2006.
- Abdul Karim, Ahmd Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Ba’la, Abdul Hamid Mahmud, *Al-Milkiyyah wa Dhawabithiba fi al-Islam, Dirasat Muqaranah ma’ Abdatsi at-Thabaqat al-Ilmiyah al-Mu’ashirah*, Al-Azhar/ Mesir: Dar at-Taufiq an-Namudzujijyah, 1985.
- al-Jum’ah, ‘Ali bin Muhammad, *Mu’jam al-Musthalabat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, ۲۰۰۰.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hatta, Mohammad, *Sosialisme Religius; Suatu Jalan Keempat*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, ۲۰۰۲.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Misanam, Munrokhim dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid. 1, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim al-Haramain Asy-syarifain Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf Asy-Syarif, Madinah Munawarah: tt.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Nasution, Muhammad Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.